



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Renggut 700 nyawa & ratusan orang masih hilang: layakkah banjir Sumatera ditetapkan jadi Bencana Nasional?
Tanggal	: Rabu, 03 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Renggut 700 Nyawa & Ratusan Orang Masih Hilang

## Layakkah Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional?

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah merenggut 700 nyawa dan ratusan lainnya hilang. Reruntuhan di tiga provinsi hancur total. Jutaan rakyat mengungsi dari tempat tinggalnya.

Karenanya, Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak Pemerintah segera menetapkan bencana banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan setelah rapat kerja bersama BMKG dan Basarnas di kompleks parlemen, Senayan pada Senin (1/12/2025). "Kita mendorong banjir Sumatera jadi bencana nasional," ujar Lasarus kepada wartawan.

Lasarus menegaskan, banyak

fasilitas umum, termasuk jalan dan jembatan, lumpuh total akibat banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Sumatera. Dengan status bencana nasional, Pemerintah dapat menggerakkan sumber daya yang lebih besar untuk percepatan penanganan dan pemulihannya.

Senada, Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Eddy Kurniawan ada beberapa alasan yang membuat banjir dan longsor Sumatera bagian utara ini layak digolongkan sebagai bencana nasional.

Edy menyenggiring riset yang menyatakan bahwa salah satu penyebab dominan dari banjir dan longsor ini adalah kesalahan

tata kelola hutan oleh Pemerintah, khususnya di tingkat pusat.

"Sehingga memang sangat logik tragedi ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Agar Pemerintah pusat yang seharusnya mengetahui yang paling bertanggung jawab melakukan pemuliharan dalam tragedi ini," ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Ketua MPR, Ahmad Muzani punya pendapat lain. Menurutnya, Pemerintah belum menetapkan bencana nasional karena Pemda masih mampu menangani situasi di wilayah masing-masing bersama Pemerintah pusat.

"Pemerintah bisa mengidentifikasi situasi di keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama pemda

kabupaten, kota, dan provinsi," ujar Muzani saat ditanya mengenai desakan masyarakat agar Presiden menetapkan status bencana bencana nasional, di Kompleks IKN, Selasa (1/12).

Muzani tak menampik bahwa terdapat beberapa daerah yang menyatakan kewalahan menghadapi dampak bencana. Namun, ia menilai persoalan ini bisa ditangani bersama-sama antara pemda dan Pemerintah pusat. "Ya, itu jadi keprihatinan juga. Situasinya memang harus dihadapi secara bersama-sama," kata Muzani.

Anggota Komisi V DPR, Yanuar Arif Wibowo sendiri sudah dapat jika Pemerintah menetapkan bencana nasional di Sumatera. "Saya secara pribadi menginginkan longsor dan bencana di Sumatera dijadikan bencana nasional," katanya.

Apakah layak ditetapkan sebagai bencana nasional? Tanya Ujang Komaruddin, Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komaruddin mengatakan Pemerintah dan Presiden mempunyai tim riset untuk menetapkan apakah layak ditetapkan sebagai bencana nasional atau tidak.

"Kita serahkan kepada Presiden dan timnya," ujar Ujang.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Ujang Komaruddin dan Yanuar Arif Wibowo terkait perlu perhatian Pemerintah menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, berikut wawancaranya.

**YANUAR ARIF WIBOWO,**  
Anggota Komisi V DPR

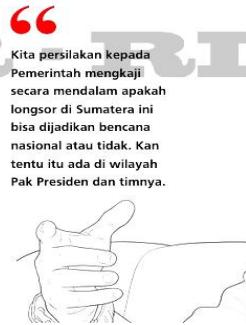
### Mereka Berharap Ada Perhatian Yang Lebih



“  
Kita akui tidak mudah bagi daerah untuk menanggung beban di tengah pemotongan anggaran oleh Pusat. Saya yakin kabupaten kota maupun provinsi tidak sanggup.

**UJANG KOMARUDDIN,** Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan

### Saat Ini, Pak Presiden Sedang Lakukan Kajian



“  
Kita persilakan kepada Pemerintah mengkaji secara mendalam apakah longsor di Sumatera ini bisa dijadikan bencana nasional atau tidak. Kan tentu ada di wilayah Pak Presiden dan timnya.



Yang lebih penting adalah menyuarakan lagi butuh dibantuan, ditolong.

**Menurut Anda apakah Pemerintah dapat optimal dalam hal memberikan bantuan?**

Kolom saya melihatnya sudah optimal. Pemerintah sudah cepat dan responsif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.

Pak Presiden langsung menurunkan Hercules dengan berbagai kebutuhan. DPR dan parpol juga suaruh untuk memberikan bantuan. Cuma, ada pejabat-pejabat yang komunikasi dan menyampaikan ke publik empatinya kurang. ■ REN

Dalam kasus musibah banjir di Sumatera, ada desakan agar Pemerintah mengeluarkan status bencana nasional. Apa pendapat Anda?

Yang pertama, saya berharap ada perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, karena Pemda tentu tidak sanggup menanggung beban ini. Terlebih memang belum ada tata cara recovery, pasca banjir ini selesai.

Kita akui tidak mudah bagi daerah untuk menanggung beban di tengah pemotongan anggaran oleh Pusat. Saya yakin kabupaten kota maupun provinsi tidak sanggup.

Tapi ini permasalahan yang

Pemerintah Pusat terkesan engg-

an untuk menetapkan sebagai bencana nasional atau parzial?

Ibu dia yang menjadi pertanyaan banyak kepada daerah. Mereka merasa ingin segera ini dijadikan bencana nasional.

Kalau menurut pendapat Anda, mau bencana atau apakah Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih? Apakah mereka butuhkan bantuan bantuan material, atau mungkin bantuan bantuan nasional partial, atau menyebutkan apapun.

Tujuannya agar kabupaten kota maupun provinsi mendapatkan perhatian bahwa mereka ini akan ditolong. Ada harapan bahwa mereka bisa recovery. Itu yang paling penting sekali.

Saya secara prinsip menginginkan itu dan bencana di Sumatera dijadikan bencana nasional. Karena sebagian peliknya penanganan di masalah banjir dan longsor ini.

Banyak pihak yang mendesak agar Pemerintah menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Tapi, kenapa Pemerintah belum juga menetapkan sebagai bencana nasional?

Untuk menetapkan bencana nasional atau tidak itu merupakan kewenangan Pak Presiden. Pak Presiden setelah mengkaji, kan.

Dulu ini ada peraturan terjadi gempa datar pada tahun 2006. Peraturan di Jawa dan jumlahnya korbannya kalau tidak salah sekitar 6 ribu jiwa, tidak tidak pernah dijadikan sebagai bencana nasional.

Kenapa? Karena dianggap Pemprov masih bisa

menjalankan tugas tugasnya. Melakukan penyelesaian kepada warganya.

**Kalau bencana di Sumatera, bantuan?**

Saya nggak tahu yang sekarang, ya. Apakah ini ditilat dari jumlah korbannya atau apa saja. Yang pasti bantuan pastinya ada.

Kita persilakan kepada Pemerintah mengkaji secara mendalam apakah longsor di Sumatera ini bisa dijadikan bencana nasional atau tidak. Kan tentu ada di wilayah Pak Presiden dan timnya.

Yang pasti kajian itu menjadi pen-

daian yang besar bahwa layak atau tidak ditetapkan bencana nasional.